



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF

PADA PENDUDUK ASLI

Yannice Luma Marnala Sitorus | Syamsudin Usman
Normalia Ode Yanthy



Yannice Luma Marnala Sitorus
Syamsudin Usman
Normalia Ode Yanthy

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pada Penduduk Asli



Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pada Penduduk Asli

Copyright © 2023

Penulis:

Yannice Luma Marnala Sitorus
Syamsudin Usman
Normalia Ode Yanthy

Editor:

Riana Kusumawati

Setting Layout:

Riana Kusumawati

Desain Sampul:

Yosep Saipul Millah

ISBN: 978-623-8040-78-0

IKAPI: 435/JBA/2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; x + 128 hlm

Font: Cambria

Cetakan Pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi:

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07,
Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

0812-1208-8836

www.megapress.co.id

admin@megapress.co.id

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pada Penduduk Asli ini, dapat memberikan pemikiran baru terhadap proses perencanaan pembangunan pada masyarakat adat di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya. Hasil penelitian yang ditulis dalam buku ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan pembangunan terkait kesejahteraan penduduk asli di daerahnya.

Dipublikasikannya hasil penelitian ini dalam bentuk buku tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan buku ini, yaitu:

Bappeda Kabupaten Tolikara, Institut Toleransi Keberagaman dan Pelestarian Lingkungan (Ilalang) Papua, Warga Kampung di Kabupaten Tolikara, dan Rekan Sejawat di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kami pun terbuka bagi kritik dan sumbang saran yang bertujuan untuk memperbaiki isi buku ini.

Jayapura, Januari 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI PAPUA	1
A. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Papua.....	1
B. Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Papua	5
C. Mengkaji Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Papua.....	6
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TOLIKARA	16
A. Kondisi Fisik Wilayah	16
B. Kondisi Sosial	35
C. Kondisi Budaya.....	38
D. Kondisi Ekonomi.....	44
E. Kondisi Sarana dan Prasarana	48
BAB 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TOLIKARA.....	65
A. Perencanaan Partisipatif.....	65
B. Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tolikara.....	72
BAB 4 HASIL PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TOLIKARA	78
A. Pembangunan Desa	78
B. Hasil Pembangunan Kampung	81
BAB 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DI PAPUA.....	104
A. Pembangunan Menurut Penduduk Asli.....	104

B. Perencanaan Pembangunan Kampung bagi Penduduk Asli Papua.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	112
INDEKS.....	120
GLOSARIUM.....	123
TENTANG PENULIS.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sebaran Jumlah Sampel pada 25 Distrik di Kabupaten Tolikara.....	11
Tabel 1. 2 Sebaran Jumlah Sampel pada 13 Distrik di Kabupaten Tolikara.....	12
Tabel 1. 3 Daftar Dimensi, Variabel, dan Indikator Penyusunan Indeks Pembangunan Desa	13
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Tolikara.....	17
Tabel 2. 2 Jumlah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Tolikara	18
Tabel 2. 3 Sebaran Kampung dan Kelurahan pada Masing-Masing Distrik di Kabupaten Tolikara	19
Tabel 2. 4 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Tolikara.....	32
Tabel 2. 5 Rerata Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Tolikara Tahun 2021	34
Tabel 2. 6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Tolikara Tahun 2021	34
Tabel 2. 7 Sebaran Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tolikara.....	35
Tabel 2. 8 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tolikara Tahun 2021.....	37
Tabel 2. 9 Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara 2014 (Ha)	45
Tabel 2. 10 Luas Panen Tanaman Sayur dan Jenis Sayuran Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara 2014 (Ha)	46
Tabel 2. 11 Produksi Tanaman Sayur dan Jenis Sayuran Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara 2014 (Ton).....	47
Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2021	49
Tabel 2. 13 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SD Menurut Distrik Di Kabupaten Tolikara, 2021.....	49

Tabel 2. 14 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SMP Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara, 2021	50
Tabel 2. 15 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SMA Swasta dan Negeri Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara, 2021	52
Tabel 2. 16 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SMK Negeri Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara, 2021	53
Tabel 2. 17 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Distrik di Kabupaten Tolikara Tahun 2021	55
Tabel 2. 18 Jumlah Puskesmas Keliling menurut Distrik di Kabupaten Tolikara Tahun 2017	56
Tabel 2. 19 Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Distrik di Kabupaten Tolikara Tahun 2017	57
Tabel 2. 20 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN pada Cabang PLN Di Kabupaten Tolikara 2011-2015	59
Tabel 2. 21 Jumlah Landasan Pesawat Terbang Menurut Status Pemilikan di Kabupaten Tolikara, 2017	59
Tabel 2. 22 Panjang Jalan di Kabupaten Tolikara Menurut Ruas Jalan, Target, Progres dan Jenis Permukaan Jalan Tahun 2004-2013	60
Tabel 2. 23 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Distrik di Kabupaten Tolikara 2014	62
Tabel 2. 24 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Distrik di Kabupaten Tolikara 2016 dan 2017	63
Tabel 3. 1 Tipologi Partisipasi Pretty	68
Tabel 4. 1 Tipologi Kampung pada 38 Distrik di Kabupaten Tolikara Tahun 2022	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tolikara..	17
Gambar 3. 1 Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tolikara.....	74
Gambar 4. 1 Alasan Putus Sekolah di Kabupaten Tolikara	82
Gambar 4. 2 Fasilitas Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tolikara.....	82
Gambar 4. 3 Puskesmas di Kabupaten Tolikara.....	83
Gambar 4. 4 Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tolikara	83
Gambar 4. 5 Penyedia Kebutuhan Utama/Primer Masyarakat di Kabupaten Tolikara.....	84
Gambar 4. 6 Kios dan Pasar Yang Tidak Operasional di Kabupaten Tolikara.....	84
Gambar 4. 7 Fasilitas Ekonomi di Karubaga Kabupaten Tolikara	85
Gambar 4. 8 Sumber Penerangan Masyarakat di Kabupaten Tolikara.....	86
Gambar 4. 9 Lamanya Waktu Penerangan di Kabupaten Tolikara.....	86
Gambar 4. 10 Fasilitas Solar Cell di Kabupaten Tolikara.....	87
Gambar 4. 11 Sistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tolikara.....	88
Gambar 4. 12 Sumber Air Bersih di Kabupaten Tolikara	88
Gambar 4. 13 Toren dan Bak Penampung Air Bersih di Kabupaten Tolikara.....	88
Gambar 4. 14 Ketersediaan Sarana MCK di Kabupaten Tolikara	89
Gambar 4. 15 Fasilitas MCK di Kabupaten Tolikara	89
Gambar 4. 16 Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tolikara.....	90
Gambar 4. 17 Kemampuan Mengakses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tolikara	90
Gambar 4. 18 Ketersediaan Jaringan Internet di Kabupaten Tolikara.....	91
Gambar 4. 19 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tolikara	91
Gambar 4. 20 Jenis Jalan di Kabupaten Tolikara.....	92

Gambar 4. 21 Intensitas Penggunaan Sarana Transportasi di Kabupaten Tolikara	92
Gambar 4. 22 Sarana Transportasi di Kabupaten Tolikara	92
Gambar 4. 23 Permasalahan Transportasi di Kabupaten Tolikara	93
Gambar 4. 24 Rerata Waktu Tempuh Menjangkau Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tolikara	94
Gambar 4. 25 Jenis Moda Transportasi Untuk Menjangkau Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tolikara.....	94
Gambar 4. 26 Rerata Waktu Tempuh Menjangkau Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tolikara	94
Gambar 4. 27 Jenis Moda Transportasi Untuk Menjangkau Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tolikara.....	95
Gambar 4. 28 Rerata Waktu Tempuh Menjangkau Fasilitas Ekonomi Penyedia Kebutuhan Utama/Primer di Kabupaten Tolikara	95
Gambar 4. 29 Jenis Moda Transportasi Untuk Menjangkau Fasilitas Ekonomi di Kabupaten Tolikara.....	96
Gambar 4. 30 Lapangan Volley di Kampung-Kampung Kabupaten Tolikara.....	97
Gambar 4. 31 Tingkat Pendidikan Kepala Kampung di Kabupaten Tolikara.....	98
Gambar 4. 32 Tingkat Pendidikan Sekretaris Kampung di Kabupaten Tolikara.....	98
Gambar 4. 33 Rumah Kepala Kampung Sekaligus Kantor Kampung di Kabupaten Tolikara.....	98
Gambar 4. 34 Peta Sebaran Tipologi Kampung di Kabupaten Tolikara.....	103

1

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI PAPUA

A. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Papua

Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua berada pada kategori rendah bila dibandingkan dengan IPM provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tiga dimensi dasar dalam IPM adalah: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Bisa dikatakan juga bahwa kualitas sumber daya manusia Provinsi Papua masih terendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Provinsi Papua, yang dapat dikatakan berada pada tingkat terendah bila dibandingkan dengan IPD provinsi lainnya, terutama bila dibandingkan dengan desa di wilayah Indonesia bagian Barat. Mayoritas desa-desa yang berada di Provinsi Papua berada pada kategori desa tertinggal. Kesenjangan hasil-hasil pembangunan antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur sangat jelas terlihat bila mengacu pada kedua indikator tersebut di atas (IPM dan IPD) pada kedua bagian wilayah tadi. Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini pembangunan masih terpusat pada wilayah Indonesia bagian Barat. Tetapi ini bukan berarti tidak ada pembangunan yang dilakukan di wilayah Indonesia bagian Timur. Sejak pemberlakuan otonomi khusus di Papua pada tahun 2001, berbagai konsep pembangunan

berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti misalkan RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) dan PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung) telah dijalankan. Pembangunan sebenarnya berjalan pesat terlebih bila melihat perkembangan yang terjadi di Provinsi Papua sekarang bila dibandingkan dengan masa lalu, akan tetapi hal ini belum berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan warga setempat, khususnya penduduk asli Papua. 'Ketertinggalan peradaban' penduduk asli Papua kemudian sering dijadikan 'kambing hitam' atas masalah kemiskinan yang tetap ada pada mayoritas warga setempat sementara sudah banyak program pembangunan yang dijalankan oleh pihak pemerintah. Penduduk asli Papua yang terdiri dari ratusan etnis atau komunitas adat dianggap belum dapat beradaptasi dengan peradaban modern yang sering ditawarkan dalam setiap program pembangunan tersebut.

Menurut data BPS, dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua, 12 kabupaten diantaranya terletak di daerah pegunungan dengan angka persentase penduduk miskin di atas 30-43%. Jumlah ini di atas rata-rata penduduk miskin secara nasional yang sebesar 9,22% pada Bulan September 2019 (BPS Indonesia). Salah satu dari 12 kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Tolikara (memiliki persentase kemiskinan sebesar 32,90%).

Walaupun Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat yang masih menjalankan hukum adatnya akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah memberlakukan secara seragam perencanaan dan implementasi pembangunan pada wilayah kota dan kabupaten di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Padahal setiap komunitas adat memiliki perencanaan pembangunan menurut pengetahuannya masing-masing. Adanya otonomi daerah mendukung setiap pemerintahan daerah dapat menjalankan perencanaan pembangunannya masing-masing, akan tetapi implementasinya oleh pemerintah daerah khususnya di wilayah yang dihuni oleh komunitas adat, tetap diberlakukan sama

dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan kesejahteraan penduduk asli Papua walau telah sekian puluh tahun menjalankan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu perlu pemikiran ulang atas berbagai konsep pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah selama ini, khususnya di wilayah Provinsi Papua, suatu wilayah adat yang luas dan dihuni oleh banyak komunitas adat, agar tujuan dan sasaran berbagai perencanaan pembangunan di sana dapat tercapai.

Perencanaan pembangunan perlu dilakukan karena faktor-faktor sebagai berikut: (1) adanya kegagalan mekanisme pasar; (2) ketidakpastian; (3) untuk memberikan arah pembangunan yang jelas (Kuncoro, 2014). Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community driven development*) merupakan pengembangan dari konsep pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) yang muncul sebagai reaksi atas konsep pendekatan pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pada abad 19 (masa industrialisasi), konsep pembangunan yang ada di dunia berorientasi pada produksi yang maksimum (pertumbuhan ekonomi). Konsep ini tidak membawa masyarakat banyak pada kesejahteraan tetapi malah memperlebar ketimpangan ekonomi di antara mereka, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Efek *trickle down* yang diharapkan dari kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terhadap kawasan di sekitarnya tidak terjadi. Yang terjadi justru adanya ketimpangan kesejahteraan antara daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah pinggiran. Pada masa itu, perencanaan pembangunan menganut sistem *top-down*, yang didominasi otoritas, di mana kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengambilan keputusan dibatasi.

Diawali oleh pemikiran David C. Korten yang menyatakan pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) adalah melihat inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama dan melihat

kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan, selanjutnya konsep pembangunan tersebut berkembang untuk mengisi kekurangan di mana pasar gagal memenuhi kepentingan sosial masyarakat dan institusi politik atau pemerintah juga gagal untuk menjalankan mandatnya dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Perspektif berbasis masyarakat ini sebelumnya telah memperoleh legitimasi dengan adanya publikasi pada tahun 1974 oleh Bank Dunia, merekomendasikan strategi pembangunan perdesaan difokuskan pada peningkatan akses bagi petani kecil dan pekerja pemilik lahan, air, pasar kredit dan fasilitas lain, yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial dengan tujuan melakukan perubahan sosial yang terencana, yaitu mencapai kondisi di mana masyarakat menjadi berdaya atau mampu melakukan pembangunan di lingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif. Dudley Seers (1973) meredefini pembangunan dalam konteks tujuan sosial yaitu bahwa sasaran utama pembangunan adalah meniadakan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Maka pembangunan ini dilaksanakan dengan strategi yang berorientasi pada kesempatan kerja, pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Dan negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah karena fokus pada investasi manusia yang merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total (Kuncoro, 2014). Kemudian dikenal istilah paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian kepada alam, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (Kuncoro, 2014). Maka sebaiknya konsep pembangunan masyarakat di Papua, yaitu

pembangunan berbasis pemberdayaan penduduk asli, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat, bukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi semata.

B. Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Papua

Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Walaupun perencanaan pembangunan diupayakan menganut sistem *bottom-up* atau partisipatif, yang berarti perencanaan dimulai pada level 'akar rumput' sehingga seharusnya tepat sasaran, akan tetapi belum banyak membawa perubahan pada masyarakat kampung di Papua, terlebih di wilayah pegunungan yang relatif masih terisolir. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi proses perencanaan pembangunan kampung di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
- b. Mengidentifikasi hasil pembangunan kampung di wilayah Pegunungan Tengah Papua lewat penentuan Indeks Pembangunan Kampung.

Mengingat luasnya wilayah Pegunungan Tengah Papua maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan Kabupaten Tolikara diambil sebagai kasus studi karena kabupaten tersebut merupakan salah satu kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Papua. Hasil kajian tentang proses perencanaan pembangunan berikut hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan bagi penduduk asli Papua di Kabupaten Tolikara dapat memberikan sumbangan pemikiran baru tentang bagaimana sebaiknya proses perencanaan pembangunan pada penduduk asli itu dilaksanakan.

C. Mengkaji Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Papua

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta metode analisis deskriptif. Sesuai tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup kegiatan penelitian ini terdiri dari:

- Identifikasi proses perencanaan pembangunan di kampung.
- Menentukan Indeks Pembangunan Kampung lewat identifikasi ragam, tingkat dan persebaran pemenuhan kebutuhan dasar penduduk kampung.

Tahapan pelaksanaan penelitian disusun dalam rencana kegiatan sebagai berikut:

a. Persiapan

Kegiatan ini lebih difokuskan pada konsolidasi tim peneliti dan pengadaan dokumen administrasi. Pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang mendukung kegiatan penelitian dan pengadaan tenaga enumerator yang akan bertugas untuk melakukan wawancara pada masyarakat.

b. Penyusunan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang utama adalah kuesioner, yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan mencakup seluruh substansi penelitian sehingga dapat diperoleh data-data valid yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Pembekalan Enumerator

Pembekalan enumerator adalah salah satu hal yang krusial dari rangkaian kegiatan ini. Tenaga enumerator diambil dari penduduk setempat yang umumnya merupakan lulusan perguruan tinggi. Sumber daya manusia lokal ini diperkirakan akan dapat mengatasi sulitnya medan penelitian di wilayah pegunungan Papua dan akan mudah diterima oleh masyarakat setempat sehingga

memperlancar dalam hal komunikasi atau wawancara. Enumerator diberikan pemahaman terkait substansi dari pelaksanaan wawancara semi terstruktur, penjelasan yang menyeluruh terkait instrumen kuesioner yang akan digunakan, teknis pengumpulan data di lapangan dan teknis menentukan responden di lapangan.

d. Pengumpulan dan Verifikasi Data

Enumerator akan melakukan pendataan pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Kuesioner yang diisi, setelah diberi kode oleh enumerator, selanjutnya dikumpulkan pada koordinator tim distrik. Kemudian dilakukan proses validasi terhadap data yang masuk, jika hasilnya sesuai akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya tetapi jika belum sesuai akan diperbaiki dengan melakukan konfirmasi data kepada enumerator atau responden.

e. *Entry Data*

Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi data, kemudian dimasukkan pada aplikasi agar data dapat dikompilasi.

f. Analisis Data

Data yang telah dikompilasi tadi dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi, peta, dan tabel-tabel hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kampung.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup wilayah dari kegiatan penelitian ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Tolikara dengan luas 14.263 Km², yaitu meliputi 46 Distrik. Akan tetapi karena keterbatasan yang ada maka jumlah distrik yang disurvei adalah sebanyak 38 distrik.

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I pada lokasi penelitian di 25 (dua puluh lima) distrik, dilakukan selama lima (5) bulan pada tahun 2021.
2. Tahap II pada lokasi penelitian di 13 (tiga belas) distrik, dilakukan selama lima (5) bulan pada tahun 2022.

Pada tahap II ini seharusnya kajian dilakukan pada 21 distrik, tetapi karena keterbatasan sumber daya (biaya, waktu dan tenaga), aksesibilitas, faktor keamanan dan batas wilayah administrasi yang masih disengketakan antara kedua belah pihak, maka ditetapkan hanya 13 distrik yang disurvei. Kedelapan distrik yang tidak dikaji adalah: Distrik Air Garam, Distrik Douw, Distrik Wari/Tayefe, Distrik Egiyam, Distrik Tagineri, Distrik Goyage, Distrik Wina dan Distrik Tagime.

3. Pengumpulan Data

Data pada kegiatan penelitian ini diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Semi Structured Interviewing* (SSI)

Wawancara semi terstruktur. Teknik ini merupakan wawancara yang memakai gabungan pertanyaan secara bertahap yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk melebar selama *interview* berlangsung. SSI dapat dilaksanakan bersama seseorang yang dianggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, pejabat lokal (Bahua, 2018).

b. Penentuan Populasi

Populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas (Kerlinger dalam Furchan, 2004:193). Populasi atau sering juga disebut *universe* adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir. Populasi dalam penelitian bisa berupa orang (individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat) maupun benda, dan sebagainya. Ciri-ciri populasi disebut parameter (rata-rata, ragam, modus, atau *range*).

Populasi pada kegiatan penelitian ini adalah seluruh penduduk yang tinggal dan berdomisili pada 38 distrik yang berada di Kabupaten Tolikara. Penduduk sendiri adalah orang atau sekelompok orang yang menempati atau tinggal di suatu daerah (wilayah geografis Indonesia).

Pembuktian sebagai penduduk di antaranya adalah surat atau tanda kewarganegaraan.

c. Penentuan Sampel

Secara umum sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama, akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan 'bias' (kekeliruan) dalam sampel. Dengan kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Kedua, presisi. Kriteria ke-dua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi diukur oleh simpangan baku (*standard error*). Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel (S) dengan simpangan baku dari populasi (σ), makin tinggi pula tingkat presisinya. Tingkat presisi bisa ditingkatkan dengan cara menambahkan jumlah sampel (Kerlinger, 1986).

d. Penentuan Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Secara spesifik rumah tangga yang dimaksud adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam satu keluarga ideal, satu keluarga dikepalai oleh seorang kepala keluarga dengan anggota keluarga yang terdiri atas anak, istri dan orang-orang menjadi tanggungannya dalam keluarga.

Dalam pelaksanaan wawancara semi terstruktur ini, keluarga yang memenuhi kriteria sebagai responden adalah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, serta dapat menunjukkan bukti kependudukan yang menyatakan bahwa dia adalah penduduk Kabupaten Tolikara.

e. Penentuan Ukuran Sampel

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting dalam penelitian kuantitatif. Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) derajat keseragaman, (2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia (Singarimbun & Effendy, 1989). Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil. Jika rencana analisisnya mendetail atau rinci maka jumlah sampelnya pun harus banyak.

Dalam pelaksanaan *interview* ini, penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin atau Formula Yamane, yakni:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Di mana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *margin error* (1,2 - 1,5%)

Pada tahap pertama, ada dua puluh lima (25) distrik di Kabupaten Tolikara sebagai lokasi penelitian, memiliki penduduk sebanyak 95.663 jiwa (N) maka jumlah sampel dalam wawancara semi terstruktur ini adalah sebanyak 6.474 responden. Pada tahap ke-dua, ada tiga belas (13) distrik di Kabupaten Tolikara sebagai lokasi penelitian, memiliki penduduk sebanyak 26.652 jiwa (N) maka jumlah sampel dalam wawancara semi terstruktur ini adalah sebanyak 3.809 responden. Teknik sampling dilakukan dengan *random sampling* yang diterapkan pada responden setiap Rukun Tetangga di seluruh Kabupaten Tolikara.

Sebaran responden untuk setiap kampung didasarkan pada proporsi sebaran jumlah penduduk atau jumlah Rumah Tangga. Makin banyak jumlah penduduk dalam satu kampung maka

makin besar jumlah responden yang akan diwawancarai (lihat juga Tabel 1.1 dan 1.2).

Tabel 1. 1 Sebaran Jumlah Sampel pada 25 Distrik di Kabupaten Tolikara

NO	Distrik	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Responden Distrik
1	Kanggime	10	6.287	422
2	Woniki	10	5.636	378
3	Nabunage	11	9.000	604
4	Gilubandu	10	7.220	484
5	Wakuo	12	3.007	202
6	Aweku	10	1.579	106
7	Bogonuk	10	2.679	180
8	Karubaga	23	6.743	452
9	Wunin	9	1.971	132
10	Nelawi	12	3.081	207
11	Kuari	17	8.508	571
12	Biuk	11	856	57
13	Bokondini	11	4.179	280
14	Bokoneri	17	4.747	318
15	Kembu	11	3.386	227
16	Umagi	12	3.898	261
17	Poganeri	10	960	64
18	Nunggawi	26	7.589	509
19	Kubu	9	1,834	123
20	Anawi	10	1,110	74
21	Wugi	11	807	54
22	Geya	12	3,564	239
23	Wenam	10	1,675	112
24	Yuneri	11	4,721	317
25	Yuko	11	626	42
Total		306	95.663	6.415

Tabel 1. 2 Sebaran Jumlah Sampel pada 13 Distrik di Kabupaten Tolikara

NO	Distrik	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Responden Distrik
1	Kamboneri	8	927	132
2	Bewani	14	4.558	651
3	Numba	10	1.837	263
4	Timori	12	4.087	584
5	Panaga	9	2.294	328
6	Dundu	10	2.036	291
7	Gundagi	17	4.373	625
8	Telenggame	10	1.451	207
9	Gika	10	517	74
10	Kondaga	11	1.954	279
11	Kai	10	1.075	154
12	Lianogoma	10	1.025	146
13	Danime	10	518	74
Total		141	26.625	3.809

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik sederhana dan dideskripsikan dalam bentuk narasi serta diagram. Untuk menggambarkan tingkat kemajuan desa (atau di Papua disebut kampung) pada suatu waktu dikembangkan sistem pengukuran yang telah dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan BPS dengan apa yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif. Unit analisisnya "Desa" (atau di Papua disebut "Kampung") menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap desa (kampung) memiliki nilai IPD (atau di Papua disebut Indeks Pembangunan Kampung/IPK). IPD disusun dengan 5 dimensi yang mencakup 12 variabel dan 42 indikator (lihat Tabel 1.3).

Tabel 1. 3 Daftar Dimensi, Variabel, dan Indikator Penyusunan Indeks Pembangunan Desa

Dimensi	Variabel	No	Indikator
Pelayanan Dasar	Pelayanan Pendidikan	1	Ketersediaan & akses ke PAUD & TK
		2	Ketersediaan & akses ke SD sederajat
		3	Ketersediaan & akses ke SMP sederajat
		4	Ketersediaan & akses ke SMA sederajat
	Pelayanan Kesehatan	5	Ketersediaan & kemudahan akses ke RS
		6	Ketersediaan & kemudahan akses ke RS Bersalin
		7	Ketersediaan & kemudahan akses ke Puskesmas
		8	Ketersediaan & kemudahan akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan
		9	Ketersediaan & kemudahan akses ke tempat praktik Dokter
		10	Ketersediaan & kemudahan akses ke tempat praktik Bidan
		11	Ketersediaan & kemudahan akses ke Poskesdes atau Polindes
		12	Ketersediaan & kemudahan akses ke Apotik
Kondisi Infrastruktur	Infrastruktur Ekonomi	13	Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko Kelontong
		14	Ketersediaan Pasar
		15	Ketersediaan Restoran, Rumah Makan, atau Warung Makan
		16	Ketersediaan Akomodasi Hotel atau Penginapan

Dimensi	Variabel	No	Indikator
	Infrastruktur Energi	17	Ketersediaan Bank
		18	Elektrifikasi
		19	Kondisi Penerangan di Jalan Utama
		20	Bahan Bakar untuk Memasak
	Infrastruktur Air Bersih & Sanitasi	21	Sumber Air untuk Minum
		22	Sumber Air untuk Mandi & Cuci
		23	Fasilitas Buang Air Besar
	Infrastruktur Komunikasi & Informasi	24	Ketersediaan & Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler
		25	Ketersediaan Fasilitas Internet & Pengiriman Pos atau Barang
	Transportasi	Sarana Transportasi	26
27			Aksesibilitas Jalan
28			Ketersediaan Angkutan Umum
29			Operasional Angkutan Umum
Aksesibilitas Transportasi		30	Waktu Tempuh per Kilometer Transportasi ke Kantor Distrik
		31	Biaya per Kilometer Transportasi ke Kantor Distrik
		32	Waktu Tempuh per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati
		33	Biaya per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati
Pelayanan Umum	Kesehatan Masyarakat	34	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
		35	Penanganan Gizi Buruk
	Olah Raga	36	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga
		37	Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga

Dimensi	Variabel	No	Indikator
Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Kemandirian	38	Kelengkapan Pemerintahan Desa
		39	Otonomi Desa
		40	Aset/Kekayaan Desa
	Kualitas Sumber Daya Manusia	41	Kualitas Kepala Desa
		42	Kualitas Sekretaris Desa

Sumber: BPS, 2018

Apabila IPD diukur secara berkala dan ditampilkan antar waktu, maka dapat diperoleh dinamika dan perubahan tingkat kemajuan desa. Dinamika dan perubahan tingkat kemajuan desa secara tidak langsung merupakan ukuran kinerja pembangunan di desa atau kawasan perdesaan. Penghitungan IPD menghasilkan ukuran komposit yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan tipologi desa antara lain:

1. Desa Tertinggal Desa yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa Tertinggal adalah desa dengan nilai IPD kurang dari sama dengan 50 (IPD Tertinggal $\leq 50,00$).
2. Desa Berkembang Desa yang sudah terpenuhi SPM namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan. Desa Berkembang merupakan desa dengan nilai IPD. Desa Berkembang adalah desa dengan nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75 ($50,00 < \text{IPD Berkembang} \leq 75,00$).
3. Desa Mandiri Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan. Desa Mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75 (IPD Mandiri $> 75,00$).

2

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TOLIKARA

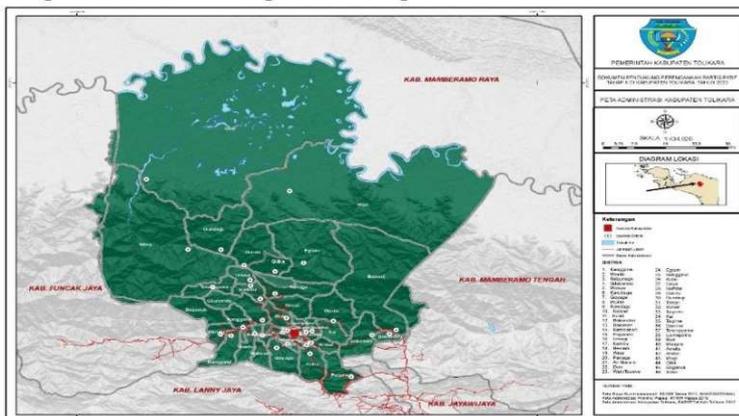
A. Kondisi Fisik Wilayah

Secara geografis Kabupaten Tolikara terletak pada titik koordinat 4°98' - 7°10' Lintang Selatan dan 139°00"-139°15" Bujur Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Tolikara mempunyai batas sebagai berikut (lihat juga Gambar 2.1):

- Sebelah Utara : Kabupaten Mamberamo Raya
- Sebelah Timur : Kabupaten Mamberamo Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Puncak Jaya

Wilayah Kabupaten Tolikara yang memiliki luas 14.263 km² terdiri dari 46 Distrik, 541 Kampung dan 4 Kelurahan dengan Ibukota Kabupaten berada di Karubaga. Distrik Bewani merupakan daerah terluas yaitu 583 km² atau sebesar 4,00 % dari total luas Kabupaten Tolikara, sedangkan Distrik Yuko merupakan daerah terkecil dengan luas 172 km² atau sebesar 1,18 % dari total luas Kabupaten Tolikara. Jumlah distrik dan luas masing-masing distrik di Kabupaten Tolikara dapat dilihat pada Tabel 2.1, jumlah kampung dan kelurahan di Kabupaten Tolikara dapat dilihat pada Tabel 2.2, sedangkan sebaran

kampung dan kelurahan pada masing-masing distrik di Kabupaten Tolikara dapat dilihat pada tabel 2.3.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tolikara
 Sumber: Bappeda Kabupaten Tolikara, 2022

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Tolikara

No.	Nama Distrik	Luas wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Kanggime	308	2,11
2	Woniki	368	2,53
3	Nabunage	281	1,93
4	Gilubandu	439	3,01
5	Wakuo	231	1,59
6	Karubaga	312	2,14
7	Goyage	431	2,96
8	Wunin	225	1,54
9	Kondaga	233	1,60
10	Nelawi	245	1,68
11	Kuari	445	3,06
12	Bokondini	433	2,97
13	Bokoneri	347	2,38
14	Bewani	583	4,00
15	Kembu	462	3,17
16	Wina	435	2,99
17	Umagi	375	2,57
18	Panaga	244	1,68
19	Poganeri	279	1,92
20	Kamboneri	283	2,63
21	Air Garam	425	2,92
22	Dow	418	2,87
23	Wari/Tayeve	443	3,04
24	Egiam	467	3,21
25	Nunggawi	236	1,62

No.	Nama Distrik	Luas wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
26	Kubu	233	1,60
27	Geya	342	2,35
28	Numba	452	3,10
29	Dundu	403	2,77
30	Gundagi	397	2,73
31	Timori	454	3,12
32	Yuneri	247	1,70
33	Tagineri	223	1,53
34	Kai	221	1,52
35	Tagime	232	1,59
36	Danime	212	1,46
37	Telenggeme	219	1,50
38	Lianogoma	252	1,73
39	Biuk	215	1,48
40	Wenam	231	1,59
41	Aweku	234	1,61
42	Anawi	189	1,30
43	Wugi	192	1,32
44	Gika	186	1,28
45	Bogonuk	210	1,44
46	Yuko	172	1,18
Total		14.564	100

Sumber: Kabupaten Tolikara Dalam Angka, 2022

Tabel 2. 2 Jumlah Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Tolikara

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan
1	Kanggime	9	1
2	Woniki	10	-
3	Nabunage	11	-
4	Gilubandu	10	-
5	Wakuo	12	-
6	Karubaga	22	1
7	Goyage	19	-
8	Wunin	9	-
9	Kondaga	11	-
10	Nelawi	12	-
11	Kuari	17	-
12	Bokondini	10	1
13	Bokoneri	17	-
14	Bewani	14	-
15	Kembu	10	1
16	Wina	13	-
17	Umagi	12	-
18	Panaga	9	-
19	Poganeri	10	-

3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TOLIKARA

A. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Beberapa pendekatan partisipatif (praktek perencanaan komunikatif) diperkenalkan sebagai cara atau mekanisme praktek konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini melatih masyarakat untuk berpikir kritis (rasional) dalam memetakan permasalahan dan aset atau modal pembangunan yang mereka miliki serta menemukan solusi atas permasalahan tadi (Chambers, 2001). Pendekatan terbaru menekankan akan pentingnya peran masyarakat sehingga para fasilitator pendamping masyarakat tersebut harus berperan sedemikian rupa, misalnya antara lain tidak

forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang diadakan secara berjenjang di tingkat Distrik, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Proses perencanaan pada level bawah dilaksanakan pada tingkat desa/kampung lewat musyawarah desa. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa. Sedangkan bila dikelompokkan menurut jangka waktu, maka dikenal beberapa istilah dalam perencanaan seperti yang dijelaskan berikut ini. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis SKPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan, yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

B. Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tolikara

Perencanaan pembangunan merupakan proses awal dalam menyusun program pembangunan sebelum diimplementasikan. Perencanaan yang baik adalah berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, di lapangan. Menurut Kuncoro (2012), perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor: (1) adanya mekanisme kegagalan pasar (*market failures*), (2) ketidakpastian (*uncertainty*) masa datang dan (3) untuk memberikan arah pembangunan yang jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, perencanaan pembangunan diartikan sebagai

suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tolikara secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Penyusunan Rancangan Awal

Proses ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tolikara dengan mengacu pada RPJM Kabupaten Tolikara. Bappeda Kabupaten Tolikara berkoordinasi dengan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk melihat data kebutuhan dari setiap SKPD tersebut. Penyusunan rancangan awal ini mengacu kepada visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Tolikara. Setiap SKPD menyampaikan usulan kebutuhan pembangunan untuk dilakukan pada periode pembangunan tahun berikutnya.

2. Musrenbang

Usulan setiap SKPD merupakan hasil musyawarah pembangunan (Musrenbang) di tingkat distrik. Sebelum Musrenbang dilakukan di setiap distrik, ada mekanisme Musrenbang yang dilakukan di tingkat bawahnya seperti tingkat RT dan RW. Proses ini tidak dilakukan di setiap kampung disebabkan oleh belum adanya perangkat RT dan RW serta keterbatasan SDM yang dimiliki. Usulan program kegiatan dari setiap kampung belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dikarenakan tidak dilakukan secara baik dan belum melibatkan *stakeholder* pada tingkatan tersebut.

3. Perumusan Rencana Akhir

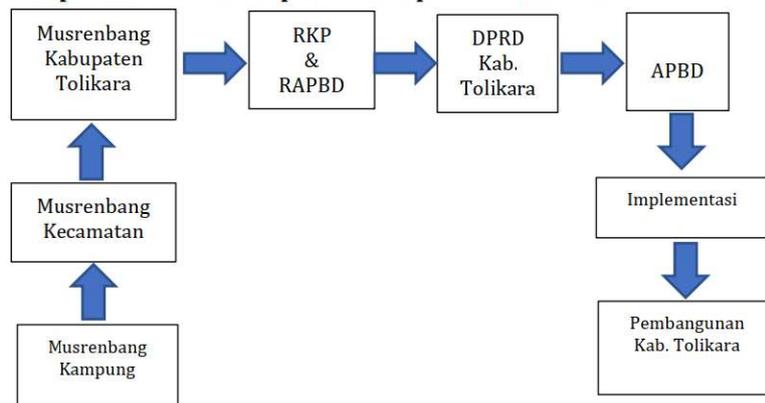
Sebelum dirumuskan menjadi rancangan akhir, semua usulan program pembangunan dari setiap SKPD, oleh Bappeda Kabupaten Tolikara dibuat skala prioritas, mana program kerja yang dapat dilaksanakan dan mana program kerja yang tidak dapat dilaksanakan. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolikara. Tahap ini

merupakan tahapan yang krusial, sebab tidak semua program kerja yang diusulkan berbagai SKPD dapat diakomodir.

4. Penetapan Rencana

Penetapan rencana merupakan proses akhir dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tolikara. Semua rumusan rancangan akhir dibahas oleh eksekutif bersama legislatif pemerintah daerah Kabupaten Tolikara. Setelah disepakati bersama maka dituangkan dalam peraturan daerah sebagai dokumen publik untuk dijadikan acuan pembangunan di Kabupaten Tolikara.

Dalam penetapan rencana akhir pembangunan di Kabupaten Tolikara, belum bisa sepenuhnya mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Ini juga membuat masalah tersendiri untuk pemerintah daerah Kabupaten Tolikara. Situasi ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolikara menjadi berkurang. Dampak lain yang dirasakan adalah adanya penolakan/resistensi terhadap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tolikara sehingga pembangunan tidak berjalan secara maksimal. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Tolikara dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tolikara

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Strategi pendekatan partisipatif ini sudah diterapkan di Kabupaten Tolikara yaitu dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik dan kemudian ke Musrenbang tingkat kabupaten. Namun penguatan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang selama ini dilakukan belum cukup menyentuh akar permasalahan masyarakat di daerah, yang disebabkan antara lain karena kurangnya data pendukung tentang potensi daerah, kondisi daerah, kebutuhan dan permasalahan-permasalahan daerah yang merupakan skala prioritas. Musrenbang tingkat kampung di Kabupaten Tolikara hanya menjadi semacam formalitas saja karena sesungguhnya keputusan dalam setiap perencanaan pembangunan di kampung-kampung berada di tangan pihak pemerintah daerah.

Dalam perencanaan di wilayah yang berskala luas, umumnya negara lebih fokus pada perencanaan fisik (infrastruktur) dari pada perencanaan sosial ekonomi, juga lebih fokus pada perencanaan alokasi (*allocative planning*) dari pada perencanaan pembangunan (*innovative or development planning*), (Glass, 1983, dalam Taylor, 2004). Perencanaan alokasi ini terkait dengan efisiensi dan koordinasi dalam sistem. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi konflik alokasi sumber daya yang terbatas dan menjamin bahwa implementasi program akan sesuai dengan yang tertulis. Kemudian pemerintah lebih menyukai menentukan tujuan perencanaan yang bersifat umum (*planning goals*) dari pada tujuan perencanaan yang lebih rinci sehingga dapat diukur (*planning objectives*) karena sebenarnya pemerintah tidak memiliki data penduduk asli yang lebih spesifik yang diperlukan untuk menyusun program yang lebih detail. Data spesifik ini dibutuhkan karena ada perbedaan parameter untuk menentukan suatu indikator antara negara dan penduduk asli, seperti misalkan pada indikator ekonomi. Bagi masyarakat adat tertentu, kemampuan ekonomi seseorang tidak diukur dari

akumulasi harta atau asetnya tapi dari seberapa banyak warga yang dibantu dari harta yang dimilikinya (Taylor, 2004).

Perencanaan partisipatif idealnya diterapkan pada masyarakat dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang cenderung heterogen karena pada komunitas yang demikian, akan muncul pemikiran dan pendapat yang beragam dan saling melengkapi yang pada akhirnya, setelah melalui proses musyawarah, akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik pula. Pada kondisi yang demikian, tingkat partisipasi yang lebih tinggi menurut Arnstein (1969) atau Pretty (1995) akan dapat tercapai. Karakteristik yang demikian tidak ditemui pada komunitas adat atau penduduk asli Papua. Dari aspek sosial, budaya dan ekonomi, karakteristik mereka cenderung homogen. Hal ini dapat dilihat pada hasil survei di Kabupaten Tolikara. Hampir 100% responden merupakan penduduk asli setempat dan beragama Kristen Protestan, bekerja sebagai petani (92%), dan merupakan kelompok ekonomi lemah atau berpendapatan di bawah Rp2.500.000,- per bulan (93,78%).

Menurut Booher dan Innes (2002), karakteristik peserta yang beragam dan adanya ketergantungan antar peserta akan mendukung terlaksananya dialog yang otentik pada proses perencanaan kolaboratif (partisipatif). Lewat dialog otentik ini kemudian para peserta proses perencanaan kolaboratif akan berbagi identitas, berbagi pemahaman, dan pada akhirnya akan memperoleh solusi bersama yang inovatif atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kondisi ideal agar perencanaan kolaboratif ini dapat berlangsung tidak ditemui pada penduduk asli karena: kurang beragam (karakteristik penduduk asli cenderung homogen dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya) dan kompetensi rendah saat berhadapan dengan pihak luar, penduduk asli sangat bergantung pada pemerintah dalam hal implementasi berbagai program pembangunan yang sifatnya modern, sikap yang sama tidak berlaku sebaliknya (pemerintah cenderung menolak pendapat/aspirasi awal dari penduduk asli karena konsep tata kelola mereka yang berbeda dengan konsep tata kelola pemerintah); belum terjadi dialog

4

HASIL PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TOLIKARA

A. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan perdesaan menurut Deaton dan Nelson (1992) merupakan alokasi fisik, sosial dan sumber daya manusia dalam pola spasial yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk:

- b. Menyediakan pendapatan untuk seluruh anggota keluarga;
- c. Pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja, kewarganegaraan;
- d. Akses terhadap pelayanan Kesehatan;
- e. Pengembangan ekonomi regional dan ekonomi masyarakat (*community economics*) yang secara nasional mampu membangkitkan kesempatan ekonomi baru;

- f. Kepemimpinan dan struktur organisasi yang tepat yang menjamin ekonomi dan kesehatan sosial;
- g. Lingkungan dan sumber daya alam yang sehat.

Lebih jauh Deaton dan Nelson menyatakan bahwa pembangunan perdesaan harus melintasi berbagai subjek (*multiple subject areas*) seperti pengangguran, upah, pendapatan, kesehatan dan isu-isu lingkungan hidup. Di sisi lain, Murdoch (2000), Van Der Plog, *et al.* (2000) dan Gustztav (2005) mengembangkan pembangunan perdesaan dengan pendekatan yang dikenal sebagai paradigma baru pembangunan perdesaan (*new paradigm of rural development*) yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat endogenous (*endogenous development*) dengan indikator yang terstruktur termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik dan nilai-nilai ekologis.

Pembangunan perdesaan yang bersifat *endogenous* bercirikan (Lowe *et al.*, 1998):

- a. Prinsip kunci yaitu sumber daya yang spesifik di suatu wilayah perdesaan (sumber daya manusia, alam, dan budaya) merupakan kunci dari pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Kekuatan dinamis berupa inisiatif lokal dan kewirausahaan.
- c. Fungsi wilayah perdesaan: layanan ekonomi yang beragam.
- d. Identifikasi masalah perdesaan: keterbatasan kapasitas
- e. Fokus: pengembangan kapasitas dan mengatasi keterasingan sosial.

Menurut amanat dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap pembangunan desa harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pokok setiap individu atau masyarakat yang harus dipenuhi sebagai persyaratan minimum untuk bisa hidup secara layak, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan perumahan.

- b. Pembangunan sarana dan prasarana kampung
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- e. Pemerintahan desa

Maka pembangunan desa secara umum diarahkan pada kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai kondisi geografis.
- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.
- f. Pengembangan sumber daya manusia, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan di desa adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- b. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan kampung terdapat dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan tersebut, dokumen yang dimaksud adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Hasil Pembangunan Kampung

1. Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan Pendidikan

Sebagian besar kampung di Kabupaten Tolikara tidak memiliki fasilitas pendidikan berupa PAUD/TK dan SD, bahkan beberapa distrik di sana tidak memiliki fasilitas pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD hingga SMA. Terdapat beberapa sekolah SD tidak operasional karena keterbatasan tenaga pengajar atau kepala sekolah/guru tidak aktif bekerja sehingga warga harus menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang jauh dari rumah.

Pada aspek pendidikan, masih terdapat 17% anak dengan usia 7-20 tahun yang tidak bersekolah sedangkan angka putus sekolah sebesar 3,14%, dengan jenjang putus sekolah terbesar berada pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (34%). Permasalahan anak tidak sekolah di Kabupaten Tolikara dipengaruhi oleh masih minimnya keinginan untuk bersekolah dan biaya pendidikan yang tidak terjangkau, sedangkan angka putus sekolah di pengaruhi oleh faktor biaya yang tidak terjangkau (57%) dan alasan lain, diantaranya masih rendahnya keinginan anak untuk bersekolah dan jarak sekolah yang cukup jauh (26%).



Gambar 4. 1 Alasan Putus Sekolah di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 2 Fasilitas Pendidikan SD, SMP, dan SMA di
 Kabupaten Tolikara
Sumber: Ilalang, 2022

b. Pelayanan Kesehatan

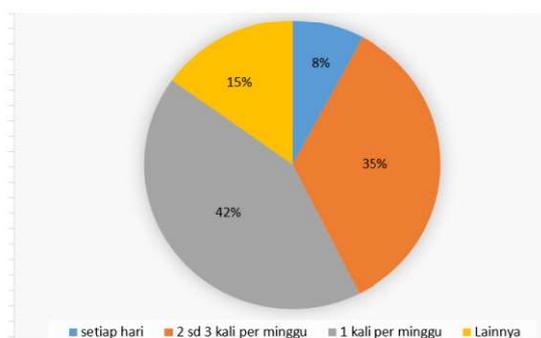
Fasilitas layanan kesehatan berupa puskesmas masih terbatas jumlahnya di Kabupaten Tolikara karena tidak setiap distrik memiliki puskesmas, dan beberapa puskesmas (termasuk puskesmas keliling dan puskesmas pembantu) tidak operasional karena keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung (peralatan medis dan obat-obatan).

Sebagian besar warga memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas, yang berada jauh dari kampungnya. Mayoritas warga yang melahirkan tidak menggunakan fasilitas kesehatan

sebagian besar jalan di Kabupaten Tolikara merupakan jalan tanah (44%) dan jalan setapak (21%). Intensitas warga menggunakan sarana transportasi ini rata-rata 1 kali/minggu (42%) dan 3-4 kali/minggu (35%).



Gambar 4. 20 Jenis Jalan di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022



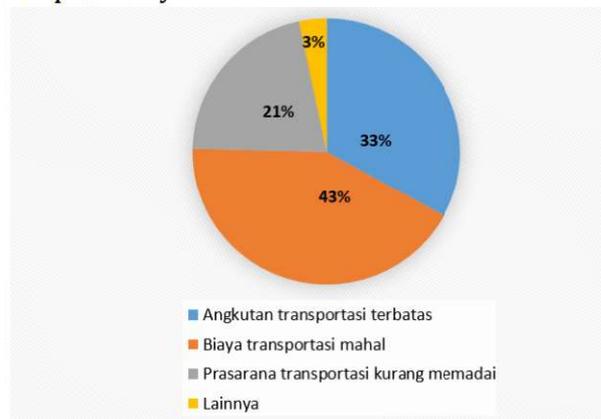
Gambar 4. 21 Intensitas Penggunaan Sarana Transportasi di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 22 Sarana Transportasi di Kabupaten Tolikara
Sumber: Ilalang, 2022

b. Aksesibilitas Transportasi

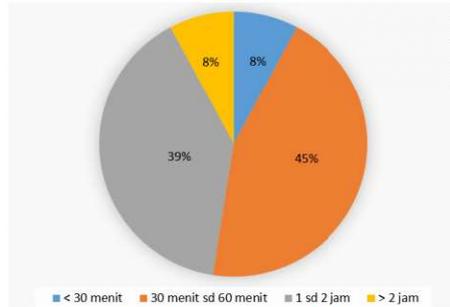
Permasalahan transportasi yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Tolikara adalah sebagian besar masyarakat mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi (43%) dan terbatasnya angkutan transportasi (33%). Biaya transportasi untuk mencapai Karubaga dimulai dari kisaran Rp 150.000,- sampai dengan Rp 3 – 4 juta sekali jalan, bergantung pada jenis sarana transportasi yang digunakan (sepeda motor atau mobil) dan jarak tempuhnya. Makin jauh dari Karubaga, semakin mahal biaya transportasinya.



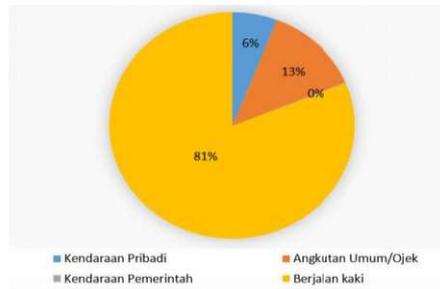
Gambar 4. 23 Permasalahan Transportasi di Kabupaten Tolikara

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Karena permasalahan transportasi tersebut, warga kampung memerlukan 'upaya ekstra' dalam menjangkau fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau sarana pendidikan sekitar 30-60 menit (45%), dan mayoritas siswa berjalan kaki (81%).

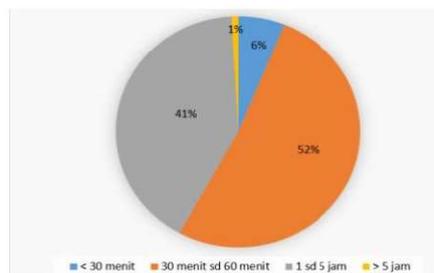


Gambar 4. 24 Rerata Waktu Tempuh Menjangkau Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022

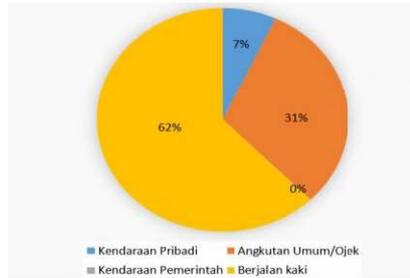


Gambar 4. 25 Jenis Moda Transportasi Untuk Menjangkau Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau sarana kesehatan sekitar 30-60 menit (52%), dan mayoritas warga kampung berjalan kaki (62%).

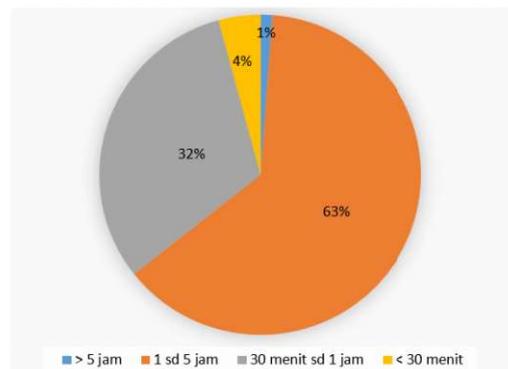


Gambar 4. 26 Rerata Waktu Tempuh Menjangkau Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022

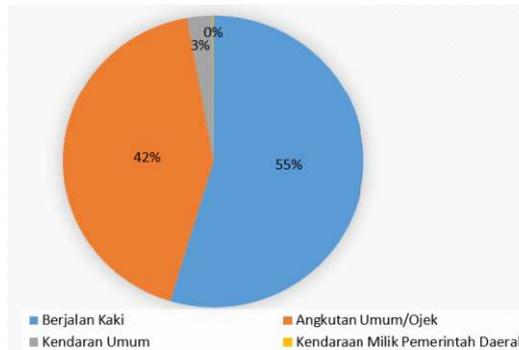


Gambar 4. 27 Jenis Moda Transportasi Untuk Menjangkau Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Untuk mencapai fasilitas ekonomi terutama fasilitas penyedia tempat kebutuhan utama/primer, sebagian besar masyarakat melakukannya dengan berjalan kaki (55%) dan menggunakan angkutan umum/ojek (42%), dengan rata-rata lama waktu perjalanan adalah 1-5 jam (63%) dan 30 menit - 1 jam (32%).



Gambar 4. 28 Rerata Waktu Tempuh Menjangkau Fasilitas Ekonomi Penyedia Kebutuhan Utama/Primer di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 29 Jenis Moda Transportasi Untuk Menjangkau Fasilitas Ekonomi di Kabupaten Tolikara
Sumber: Hasil Analisis, 2022

4. Pelayanan Umum

Kinerja pada aspek pelayanan umum dilihat dari penanganan Kejadian Luar Biasa/KLB (umumnya akibat wabah penyakit) dan gizi buruk, ketersediaan fasilitas olah raga serta keberadaan kelompok olah raga di kampung-kampung. Informasi seputar KLB masih belum banyak diketahui. Umumnya kepala kampung menjelaskan bahwa kejadian jatuhnya korban jiwa lebih banyak diakibatkan konflik sosial (perang antar marga) sementara bila ada informasi KLB akibat wabah penyakit, tidak dijelaskan akibat jenis penyakit apa dan berapa banyak korban meninggal dunia. Minimnya data bukan berarti tidak terjadi KLB di berbagai kampung di Kabupaten Tolikara. Demikian pula dengan informasi gizi buruk. Ketiadaan informasi bukan berarti tidak ada kejadian gizi buruk di sana karena sesungguhnya Kabupaten Tolikara juga menjadi sasaran program pengentasan *stunting* yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Untuk fasilitas olah raga, baru sedikit kampung yang memiliki, umumnya adalah lapangan volley yang disiapkan secara swadaya oleh masyarakat atau lembaga gereja. Sedangkan untuk kelompok kegiatan olah raga, baru ada di Kelurahan Karubaga, yang memiliki lapangan sepak bola, yaitu Tolikara *Football Club* (Toli FC).

perlu meningkatkan pemahaman mereka akan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala kampung sebagai pejabat pemerintah kampung belum melakukan tupoksinya dengan baik misalnya menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, membina masyarakat kampung dan memberdayakan masyarakat kampung. Tugas kepala kampung di Kabupaten Tolikara seakan-akan hanya mengurus bantuan dana desa semata.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepala kampung di Kabupaten Tolikara menjadi sangat penting mengingat peranannya, selain sebagai pimpinan pemerintahan yang mewakili negara, juga sebagai pimpinan adat yang mempunyai pengaruh besar terhadap warga kampung yang juga merupakan komunitas adat. Kehidupan warga kampung di Kabupaten Tolikara masih banyak dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat. Dengan pengaruh ketokohnya, kepala kampung dapat meningkatkan partisipasi warganya dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan mengarahkan warganya agar menjalankan setiap program pembangunan kampung menurut konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan nantinya warga kampung tidak hanya berpartisipasi saat pencairan dana desa saja tetapi juga terlibat aktif sejak awal proses perencanaan pembangunan pada kampung masing-masing sehingga dengan sendirinya akan belajar untuk paham apa makna sesungguhnya dari pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

6. Indeks Pembangunan Kampung

Dari hasil analisis data, diperoleh Indeks Pembangunan Kampung (IPK) dari 449 kampung/kelurahan pada 38 distrik di Kabupaten Tolikara. IPK yang diperoleh merupakan nilai yang berlaku relatif di Kabupaten Tolikara. Demikian pula dengan pembagian tipologi kampung, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tolikara.

Kampung di Kabupaten Tolikara terdiri dari tiga tipologi, yaitu: kampung belum berkembang (IPK <23,40), kampung

sedang berkembang (IPK 23,40 – 31,89), dan kampung berkembang (IPK > 31,89). Pada 38 distrik di Kabupaten Tolikara yang dikaji ini terdapat 92,43% kampung belum berkembang (415 kampung), 7,13% kampung sedang berkembang (32 kampung/kelurahan), dan 0,44% kampung berkembang (2 kelurahan). Bila mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, tipologi desa terdiri dari: desa tertinggal (IPD ≤ 50), desa berkembang (IPD >50 sampai ≤75), dan desa mandiri (IPD >75), dan sesungguhnya seluruh kampung/kelurahan pada 38 distrik di Kabupaten Tolikara ini merupakan desa tertinggal karena memiliki IPK di bawah 50. Kampung-kampung yang berada pada distrik yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten (Distrik Karubaga) cenderung lebih berkembang daripada kampung-kampung yang berada jauh dari pusat tersebut. Adapun jumlah kampung menurut tipologinya pada 38 distrik yang dikaji, dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.34.

Tabel 4. 1 Tipologi Kampung pada 38 Distrik di Kabupaten Tolikara Tahun 2022

No.	Distrik	Jumlah Kampung	Tipologi Kampung					
			Belum Berkembang		Sedang Berkembang		Berkembang	
			Unit	%	Unit	%	Unit	%
1	Kanggime	10	4	40	5	50	1	10
2	Woniki	10	10	100	0	0	0	0
3	Nabunage	11	10	91	1	9	0	0
4	Gilubandu	10	10	100	0	0	0	0
5	Wakuo	12	10	83	2	17	0	0
6	Aweku	10	10	100	0	0	0	0
7	Bogonuk	10	10	100	0	0	0	0
8	Karubaga	23	15	65	7	31	1	4
9	Wunin	9	9	100	0	0	0	0
10	Nelawi	12	8	67	4	33	0	0
11	Kuari	17	14	82	3	18	0	0
12	Biuk	11	11	100	0	0	0	0
13	Bokondini	11	8	73	3	27	0	0
14	Bokoneri	17	17	100	0	0	0	0
15	Kembu	11	9	81	2	19	0	0
16	Umagi	13	12	92	1	8	0	0
17	Pogoneri	10	9	90	1	10	0	0

18	Nunggawi	26	26	100	0	0	0	0
19	Kubu	10	10	100	0	0	0	0
20	Anawi	10	10	100	0	0	0	0
21	Wugi	11	11	100	0	0	0	0
22	Geya	12	12	100	0	0	0	0
23	Wenam	10	10	100	0	0	0	0
24	Yuneri	11	11	100	0	0	0	0
25	Yuko	11	11	100	0	0	0	0
26	Bewani	14	14	100	0	0	0	0
27	Kamboneri	8	8	100	0	0	0	0
28	Danime	10	10	100	0	0	0	0
29	Dundu	10	10	100	0	0	0	0
30	Gundagi	17	17	100	0	0	0	0
31	Telengeme	10	10	100	0	0	0	0
32	Gika	10	10	100	0	0	0	0
33	Panaga	9	9	100	0	0	0	0
34	Numba	10	10	100	0	0	0	0
35	Lianogoma	10	9	90	1	10	0	0
36	Kai	10	10	100	0	0	0	0
37	Timori	12	11	91,67	1	8,33	0	0
38	Kondaga	11	10	90,91	1	9,09	0	0
Total		449	415		32	2		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kampung-kampung yang tertinggal ini menunjukkan bahwa di sana belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Bahwa selain dana kampung yang tidak dikelola menurut konsep *good governance*, juga menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara, yang umumnya bersifat *top down* dan teknokratis, belum dapat diadaptasi dengan baik oleh masyarakat asli kampung. Ketergantungan warga kampung sangat besar pada pihak pemerintah dan setiap program pembangunan yang sifatnya 'modern' tidak dapat direncanakan secara mandiri oleh pemerintah kampung dan warganya, terlebih lagi pada implemenasinya. Dengan segala keterbatasan yang ada di Kabupaten Tolikara, salah satunya adalah banyak kampung yang relatif terisolir karena akses transportasi masih sulit, ditambah lagi dengan rendahnya kapasitas dan kapabilitas

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DI PAPUA

A. Pembangunan Menurut Penduduk Asli

Pada tahun 1980-an, di beberapa negara sedang berkembang sering terjadi konflik antara negara dan penduduk asli adat akibat penolakan mereka terhadap program-program pembangunan yang bersifat modern, yang dirasakan tidak sesuai dengan budaya lokal (Clarke, 2001). Arah pembangunan yang menuju modernisasi sering menimbulkan konflik dengan penduduk asli di berbagai negara yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya etnosida oleh militer (Clarke, 2001). Menurut Wallerstein (2004, dalam Susan, 2014) pembangunan adalah mekanisme eksploitasi dari lembaga kolonial terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan atau kalah untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Sampai saat ini pembangunan yang didominasi konsep liberalisme dan kapitalisme lebih menguntungkan segelintir kelompok pemilik modal dan memperbudak jutaan manusia di dunia. Itulah sebabnya mengapa pembangunan juga diwarnai konflik kekerasan (Susan, 2014).

Penduduk asli adalah masyarakat keturunan penduduk awal atau yang pertama kali mendiami suatu kawasan atau wilayah, memiliki tradisi budayanya sendiri yang diwariskan secara turun temurun. Penduduk asli juga dikenal dengan istilah

masyarakat atau komunitas adat. Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (AMAN, Kongres I Tahun 1999, dalam Siscawati, 2014).

Disebut sebagai 'masyarakat hukum adat' menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena masih memenuhi unsur-unsur: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechts-gemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2013, hal.9). Pada dasarnya masyarakat adat di banyak negara telah hidup harmonis dengan lingkungan alam, memiliki nilai-nilai ekologis dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia melalui struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik yang secara hakiki berbasis masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2008). Negara Indonesia mengakui adanya hak-hak asasi masyarakat adat lewat UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 (Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang) tetapi produk-produk hukum turunan dalam usaha implementasinya di Indonesia masih sedikit.

Penduduk asli menuntut peran dan kekuasaan yang lebih besar dari negara dalam pembangunan (*self governance/indigenous governance*). Konsep pembangunan berbasis etnis (*ethnodevelopment*) kemudian menjadi salah satu pendekatan pembangunan bagi penduduk asli. Pada konsep ini, penduduk asli dapat membangun sendiri menurut pengetahuan lokal (budaya) mereka (Talalla, 1984; Hettne, 1993; Clarke, 2001; UN, n.d.). Akan tetapi konsep *ethnodevelopment* belum

banyak berkembang hingga saat ini, baik dalam hal substansi maupun implementasinya. Akibat penjajahan pada masa lalu, budaya asli komunitas adat di berbagai negara jajahan mulai hilang dan digantikan dengan budaya penjajah (kolonialisme). Ada dualistik dalam tujuan pembangunan (teori modernisasi dan teori pembangunan alternatif) dan banyak negara condong pada modernisasi (Amien, 2005). Kemudian atas nama pembangunan, wilayah milik penduduk asli sering diokupasi oleh negara atau pihak lain atas persetujuan negara, sehingga luas wilayah adat ini mulai berkurang. Negara sendiri cenderung menolak klaim penduduk asli untuk mengupayakan pengembalian tanah adat mereka (Caleffi, 2005; Dodson, 1994, dalam Lane, 2001). Padahal untuk menjalankan konsep *ethnodevelopment* ini, penduduk asli bergantung pada kedua modal pembangunan tersebut. Hak-hak asasi penduduk asli sendiri juga baru diakui dunia dan dimasukkan dalam hukum internasional pada tahun 2007 setelah perdebatan panjang selama 20 tahun (Macdonald, 2010). Pengakuan oleh negara ini sangat penting karena untuk mengimplementasikan konsep *ethnodevelopment* perlu didahului dengan pemberian *indigenous autonomy* oleh negara.

Paradigma pembangunan yang berorientasi ekonomi menuju industrialisasi dan urbanisasi, tidak cocok diterapkan bagi penduduk asli, tetapi menentukan sendiri dan pembangunan dengan budaya dan identitas merupakan konsep yang sesuai bagi mereka. Konsep pembangunan menurut penduduk asli didasarkan pada: nilai resiprositas, solidaritas, keseimbangan, dan kolektivitas, memahami bahwa manusia hidup dengan keterbatasan alam (UN, n.d.). Bagi penduduk asli, yang utama adalah pengakuan hak-hak untuk hidup, memiliki lahan, dan berbudaya. Berdaya menurut penduduk asli adalah dapat menentukan nasibnya sendiri (*self determination*) dan melakukan pembangunan sendiri (*self development*) menurut metode/pengetahuan yang mereka miliki dan menggunakan sumber daya alam dari lahan adat yang mereka kuasai sehingga tidak bergantung pada bantuan pihak luar (IWGIA, 1989; UN,

n.d.). Kesejahteraan menurut penduduk asli yang ingin dicapai lewat pembangunan memiliki sejumlah elemen, yaitu (UN, n.d.; IWGIA, 1989): integritas pemerintahan adat; menentukan nasib sendiri dan melakukan pembangunan sendiri; pentingnya pelaku ekonomi kolektif dan institusi ekonomi masyarakat; tujuan produksi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan tetapi lebih pada peningkatan kualitas hidup; memperkaya gagasan pembangunan bahwa manusia seharusnya hidup harmonis dengan ibu pertiwi (bumi), dan interaksi antara manusia, sumber daya, dan aspek spiritual, memperkuat institusi pengetahuan masyarakat adat.

B. Perencanaan Pembangunan Kampung bagi Penduduk Asli Papua

Rendahnya ketercapaian sasaran berbagai program pembangunan yang sudah dijalankan selama ini di Provinsi Papua dapat dilihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Kampung, khususnya di Kabupaten Tolikara. Walaupun sudah dimekarkan menjadi kabupaten baru sejak tahun 2002 yang berarti telah memiliki otonomi dalam hal pemerintahan (Kabupaten Tolikara juga memiliki *indigenous autonomy* sejak Provinsi Papua diberi otonomi khusus/*indigenous autonomy* oleh pemerintah pusat), tetapi masa pembangunan yang sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun tidak banyak membawa dampak positif bagi penduduk asli di kampung-kampung.

Wilayah Kabupaten Tolikara yang luas dengan topografi berbukit-bukit dan sebagian lagi berupa dataran rendah masih minim dalam hal layanan transportasi sehingga daerahnya relatif terisolir dan masyarakatnya cenderung homogen. Pusat-pusat permukiman berupa perkampungan menyebar di berbagai distrik dengan tingkat kepadatan yang rendah. Kepadatan penduduk mulai meningkat pada daerah-daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, Kelurahan Karubaga.

Terlalu luasnya wilayah pembangunan di Papua sering dijadikan alasan pemekaran provinsi, kabupaten, distrik, atau

kampung. Padahal hal ini bisa menyebabkan porsi pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja pembangunan menjadi lebih kecil akibat harus membiayai sekian banyak penyelenggaraan pemerintahan hingga ke level bawah dan selanjutnya memperlambat laju pembangunan di daerah. Banyaknya jumlah satuan wilayah pemerintahan ini juga menyebabkan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, umumnya membuat perencanaan pembangunan yang lebih fokus pada perencanaan fisik, pada perencanaan alokasi, dan perencanaan yang bersifat umum, demi alasan-alasan: keadilan, efisiensi, serta mempermudah koordinasi.

Berbagai program pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, selalu bertujuan untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi di daerah, yang konsepnya masih belum dapat diadaptasi oleh penduduk asli setempat karena selain ada perbedaan paham juga karena belum ada sistem pasar di sana. Pada program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kondisi di mana masyarakat mampu melakukan pembangunan di lingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif, pun kurang berhasil bila diterapkan pada penduduk asli. Komunitas adat masih bersikap eksklusif karena tuntutan adatnya (etnosentrisme) atau relasi sosial komunitas adat dengan komunitas lain kurang kuat, lebih sering terjadi konflik sosial antar mereka, menyebabkan interaksi penduduk asli dengan pihak lain, yang sangat diperlukan jika ingin membentuk jejaring sosial demi peningkatan aktivitas ekonomi, menjadi sangat terbatas.

Sebaiknya program pembangunan pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan perekonomian penduduk asli (mengharuskan penduduk asli terlibat pada sektor perekonomian modern) akan tetapi lebih pada upaya peningkatan sumber daya manusianya terlebih dahulu. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPK (Indeks Pembangunan Kampung) dapat menjadi acuan dalam menentukan program pembangunan mana yang sesuai untuk

penduduk asli atau pengembangan wilayah adat. Untuk kampung dengan IPK sangat rendah, upaya awal yang dilakukan adalah pembenahan organisasi pemerintahan kampung. Tujuannya adalah agar pemerintah kampung dengan kapasitasnya yang meningkat kemudian dapat menyusun program yang sifatnya khas (lokal), memenuhi kebutuhan dasar warga, dan menyiapkan sarana prasarana dasar pendukung aktivitas warga, atau dengan kata lain sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance* terdiri dari (Handayani & Nur, 2019): partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Perlu adaptasi lagi, baik bagi pihak pemerintah maupun penduduk asli, dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, mengingat karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya mereka yang khas.

Pada aspek partisipasi masyarakat, telah disebutkan sebelumnya bahwa tingkat partisipasi warga kampung di Papua umumnya berada pada level *tokenism* atau partisipasi karena insentif material. Kehidupan keseharian penduduk asli belum banyak terintegrasi dengan peradaban modern. Kerja tradisional yang biasa mereka lakukan adalah bertani, bagi kaum perempuan, untuk memperoleh bahan pangan, dan berperang, bagi kaum pria, untuk mempertahankan wilayah teritorialnya. Pertahanan akan wilayah teritorial ini dilakukan antara lain karena ketergantungan mereka yang besar terhadap sumber daya alam. Semakin luas wilayah kekuasaan mereka, yang berarti semakin luas lahan untuk bertani dan berburu, maka semakin terjamin sumber bahan pangan untuk menunjang keberlangsungan hidup komunitasnya. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan dari pihak pemerintah, yang sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk asli itu sendiri, dianggap sebagai pekerjaan dari pihak luar, sehingga harus diberi upah.

Pada aspek supremasi hukum, belum ada pemahaman yang sama tentang hukum karena hukum yang berlaku pada masyarakat asli Papua adalah hukum adat. Pada aspek *stakeholder*, kurang heterogenya masyarakat asli Papua dan terpusatnya kekuasaan pada tokoh-tokoh adat (*patron-klien*), menyebabkan *stakeholder* yang ada di sana menjadi sangat terbatas jumlahnya, padahal peran mereka ini penting untuk menghasilkan suatu kebijakan yang terbaik bagi masyarakat.

Pada aspek orientasi pada konsensus dan kesetaraan, dengan belum adanya kesetaraan dalam hal pengetahuan tentang peradaban modern yang biasanya ditawarkan dalam setiap program pembangunan, maka konsensus yang diputuskan dalam setiap musrenbang (antara pihak pemerintah dan masyarakat) lebih merupakan kesepakatan yang terpaksa disetujui oleh warga kampung. Belum adanya kesetaraan atau rendahnya tingkat adaptasi penduduk asli terhadap peradaban modern dipengaruhi antara lain oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Walaupun penduduk asli Papua tidak menutup diri dan terbuka akan pengetahuan yang berasal dari dunia luar, tetapi terbatasnya layanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tolikara, menyebabkan mayoritas warganya tidak bersekolah (66,42%) dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan sesuai masa wajib belajar 12 tahun (13,63%).

Dalam pendekatan komunikatif, keputusan perencanaan pembangunan biasanya dibuat setelah terjadi kesepakatan antara masyarakat marjinal dan pihak pemberi dana/bantuan. Pembelajaran pada penduduk asli sebaiknya dilakukan lewat jalur dialog, bukan konsensus, agar lebih dapat memahami pengetahuan mereka yang tersirat, selain itu program yang dijalankan dari hasil konformis, dan bukan hasil kreasi inovatif penduduk asli, tidak akan berkelanjutan (de Zaldivar, 2008). Dialog merupakan suatu proses bukan untuk mencapai konsensus tapi untuk mengembangkan wawasan dalam pembelajaran dan berpikir bersama. Tidak hanya menganalisis suatu masalah, tapi berbagi pemahaman dan asumsi berikut alasannya untuk membangun wawasan yang lebih luas dan aksi

bersama (Ison dalam Keen etc, 2005). Hal ini mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama bila akan diterapkan pada suatu komunitas adat sehingga terkadang rentang waktu perencanaan pembangunan berikut implementasinya yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama ini, seperti misalkan jangka pendek (1 tahun) atau jangka menengah (5 tahun), bukanlah merupakan suatu hal yang baku atau menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah adat. Walaupun pada akhirnya program pembangunan tersebut dianggap menjadi tidak dapat terukur bila mengacu pada aspek efektivitas dan efisiensi, akan tetapi hal ini perlu dipertimbangkan karena sasarannya adalah pengembangan wawasan bersama, antara penduduk asli dan pihak pemerintah, tentang pembangunan pada masing-masing daerah adat, sesuatu yang masih sulit diukur tingkat efektivitas dan efisiensinya.

Musrenbang kampung yang diselenggarakan setiap tahunnya dapat menjadi ajang dialog antara pihak pemerintah kampung dengan warganya. Dalam musyawarah tersebut, diharapkan bisa terjadi pengembangan wawasan masyarakat kampung tentang bagaimana sebaiknya pembangunan itu dilakukan. Untuk itu diperlukan pimpinan pemerintahan kampung yang andal dalam melaksanakan musrenbang tersebut, mengingat segala keterbatasan seperti yang sudah dijelaskan di atas, agar pada perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, bisa terjadi proses pembelajaran yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2009): *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Surabaya: ITS Press.
- Adusei-Asante, K. and Hancock, P. (2012): Theories in Community-Driven Development Operatios: A Case Study of Ghana Local Government System. *European Journal of Business and Social Sciences*, 5(1), 83-98.
- Amien, A.M. (2005): *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arnstein, S. R. (1969): A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35 (4), 216-224. Diakses pada: i2s.anu.edu.au/resources/stakeholder-participation-arnstein-ladder.
- Bahua, M. I. (2018): *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Booher, D. E., and Innes, J. E. (2002): Network Power in Collaborative Planning. *Journal of Planning Education and Research* 21:221-236.
- BPS Indonesia (2014): *Indeks Pembangunan Manusia*.
- BPS Indonesia (2011): *Sensus Penduduk 2010*.
- BPS Indonesia (2018): *Indeks Pembangunan Desa 2018*.
- BPS Kabupaten Tolikara (2018): *Kabupaten Tolikara Dalam Angka Tahun 2018*.
- BPS Kabupaten Tolikara (2022): *Kabupaten Tolikara Dalam Angka Tahun 2022*.
- BPS Kota Jayapura (2022): *Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2022*.
- BPS Provinsi Papua (2019): *Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota, 2018*, diakses pada <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2019/07/09/310/indeks-pembangunan-des-provinsi-papua-menurut-kabupaten-2018.html>

- Browne, E. (2014): Community-Driven Development and Indigenous, Ethnic Minority, and Disability Issues. *Helpdesk Research Report*, 08.08.2014, diperoleh melalui internet www.gsdr.org. Diunduh pada tanggal 04 Februari 2015.
- Caleffi, P. (2005): *Sustainable ethnodevelopment*, germo, data diperoleh melalui internet www.mondialisation.org/php/public, published 12-04-2005.
- Chambers, R. (2001): *PRA Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Clarke, G. (2001): From ethnocide to ethnodevelopment? Ethnic minorities and indigenous peoples in Southeast Asia. *Journal Third World Quarterly*, 22 (3), 413-436.
- Clearly, D., Baumann, P., Bruno, M., Flores, X., and Warren, P. (2003): People-Centred Approaches, A Brief Literature Review and Comparison Types. *LSP Working Paper*, FAO-UN, September 2003.
- Cooke, B., and Khotari, U., Ed. (2001): *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.
- Dasgupta, A. and Beard, V.A. (2007): *Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia*.
- Deaton, B.J. and Nelson, G. L. (1992): Conceptual Underpinnings of Policy Analysis for Rural Development. *Southern Journal of Agricultural Economics* 24 : pp 87-99
- Djojosoekarto, A., Sumarwono, R., dan Suryaman, C. (2008): *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Djojosoekarto, Dr. Agung, dkk (2012): *Nilai-Nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance), Studi Refleksif Antropologis*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy and Indonesia Forestry and Governance Institute.
- Dongier, P., van Domelen, J., Ostrom, E., Rizvi, A., Wakeman, W., Bebbington, A., Alkire, S., Esmail, T., and Polski, M. (2001):

- Community-Driven Development, Volume 1 - Core Techniques and Cross-Cutting Issues*, 2001, World Bank.
- Freire, P. (2008): *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES.
- Freire, P. (2007): *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedmann, J. (1981): Korten, D.C. & Sjahrir (1988) *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Furchan, A. (2004): *Pengantar Dalam Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusztav, N. (2005): *Integrated Rural Development: The Concept and It's Operation. Institute of Economics. Hungarian Academic of Science Discussion Paper No MT-DP 2005/6.*
- Handayani, F.A., dan Nur, M. I. (2019): Implementasi Good Governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Hettne, B. (1993): Ethnicity and development-An elusive relationship. *Journal Contemporary South Asia*, 2(2), 123-149.
- Hikmat, H. (2001): *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, J., dan Tesoriero, F. (2008): *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Edisi ke-3*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irawan, N. (2017): *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- IWGIA (1989): *Indigenous Self-development in the Americas*, Document No.63 (Copenhagen).
- Jojola, T. (2008): Indigenous Planning - An Emerging Context, *Canadian Journal of Urban Research*, 17 (1), 37-47.
- Jouwe, M. Y., E. A. Troena, Surachman, dan M. Setiawan (2011): Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama) dalam Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9(1), 241-253. Data diperoleh melalui internet pada

<https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jan/article/view/290>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

- Keen, M., Brown, V. A., and Dyball, R., Ed. (2005): *Social Learning in Environmental Management: Building a Sustainable Future*. London: Earthscan.
- Kementerian PPN/BAPPENAS (2013): *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Kementerian PPN/BAPPENAS (2015): *Rencana Strategis Bidang Pemerintahan Desa*. Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015, Jakarta, Rabu/29 Juli 2015.
- Kerlinger, F. N. (1986): *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: GAMA Press.
- Koentjaraningrat dkk (1994): *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
- Kuncoro, M. (2012): *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2014): *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lalander, R. (2016): Ethnic rights and the dilemma of extractive development in plurinational Bolivia. *The International Journal of Human Rights*, data diperoleh melalui internet <http://dx.doi.org/10.1080/13642987.201.117989>.
- Lane, M. (2001): Indigenous Land and Community Security: A (Radical) Planning Agenda. *University of Wisconsin-Madison: Working Paper No.45*, June 2001.
- Lauer, R. H. (2003): *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Macdonald, K. (2010): Chapter 3: Indigenous Peoples and Development Goals: A Global Snapshot. *World Bank: Indigenous Peoples, Poverty and Development Draft Manuscript*.
- Mansoben, J.R. (1995): *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI.

- Matunga, H. (2013) Theorizing Indigenous People in Walker, R., Jojola, T., and Nathcer, D. (Eds), (2013). *Reclaiming Indigenous Planning*.
- Matunga, H. (2017): A Revolutionary Pedagogy of/for Indigenous People. *Planning Theory & Practice*, 18(4), 2017, 639-666.
- Melait, M. (2017): "Eitaken Herek": Hati Menurut Orang Huwula, *Studi Budaya Nusantara*, 2(1).
- Modouw, J. (2013): *Pendidikan dan Peradaban Papua : Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Bajawa Press.
- Murdoch, J. (2000): Networks – a New Paradigm of Rural Development. *Journal of Rural Studies* 16/2000, 407 – 419.
- Pamungkas, C., Budiarti, A. P., Dewi, R., dan Satriani, S. (2019): *Masalah Pendidikan & Kesehatan di Papua: Kebijakan, Tata Kelola Anggaran, dan Infrastruktur*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pigai, B. M. (2011): *Ekonomi Owaada Dimulai Dari Halaman Rumah Tiap Keluarga*. Jayapura : Deiyai.
- Pretty, Jules N. (1995): Participatory Learning For Sustainable Agriculture. *World Development*, 23 (8), 1247-1263.
- Riddell, J.K., Salamanca, A., Pepler, D.J., Cardinal, S., McIvor, O. (2017): Laying the Groundwork: A Practical Guide for Ethical Research with Indigenous Communities. *The International Indigenous Policy Journal*, 8(2), diperoleh melalui internet: <http://ir.lib.uwo.ca/iipj/vol8/iss2/6> DOI:10.18584/iipj/2017.8.2.6
- Rusdiarti, S.R. dan C. Pamungkas, ed. (2017): *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sari, Y.I., Rahman, H., dan Manaf, D.R.S. (2011): *Laporan Final Evaluasi PNPM RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan*. Bandung: Akatiga-Center for Social Analysis.
- Sari, Y.I. (2018): The Building of "Monuments": Power, Accountability and Community Driven Development in

Papua Province, Indonesia. *Doctor Dissertation*. Australian National University.

- Semboari, Y. (2012): Pemberdayaan Kampung Bidang Perumahan dan Infrastruktur Dasar (Konteks Program Respek Papua), Studi di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua. *Tesis Program Magister*. Universitas Gadjah Mada.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1989): *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siscawati, M. (2014): Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana*, 33(XVI), 3-23.
- Sitorus, Y. L. M., Nurmaningtyas, A.R., Usman, S., dan Yanthy, N. O. (2021). Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tolikara. *PEDULL: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 5 (2), 98-107.
- Soeprapto, T. (2013): Peran Kelompok Etnis Dalam Kepemimpinan Pada Pemda Provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(2), 306-316.
- Sufianti, E. (2014): Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25 (1), 77-95.
- Sufianti, E., Sawitri, D., Krishna, N. P., dan Firman, T. (2013): Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat NonKolaboratif. *MIMBAR*, 29 (2), 133-144.
- Sugandi, Y. (2013): The Notion of Collective Dignity among Hubula in Plaim Valley, Papua. *Doctor Disertation*. Westfälischen Wilhelms-Universität.
- Suryawan, I N. (2017): *Papua Versus Papua*. Yogyakarta : Labirin.
- Suryawan, I N. (2014): Desain Besar Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXIII(3), 1-18.
- Suryawan, I N., Ed., (2011): *Tanah Papua di Garis Batas, Perspektif, Refleksi dan Tantangan*. Malang: Setara Press.
- Susan, N. (2014): *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Susilo, A.T.H. (2015): Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) in Indonesia: The Challenge of Governance. *Jurnal Transformasi Global*, 2(2),
- Talalla, R. (1984): Ethnodevelopment and the Orang Asli of Malaysia: A case study of the Batau Settlement for Semai-Senoi. *Antipode*, 16(2), 27-32.
- Taylor, J. (2004): *Social Indicator for Aboriginal Governance*. Canberra: ANU Press. Diakses pada <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjkg6.8>
- The Asia Foundation dan LIPI (2018). *Roads for Communities: Building Road Connectivity Infrastructure for The Livelihood of Indigenous Papuans and The Environment*, data diperoleh melalui internet <https://asiafoundation.org/wp-content/upload>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2018.
- Tryatmoko, M. W. (2012): Politik Kebijakan Pengelolaan Dana otonomi Khusus Papua. Pembangunan Papua Dalam Pusaran Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, LIPI, 9(1), 81-98.
- UN, n.d. : *Indigenous Peoples: Development with Culture and Identity, Articles 3 and 32 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, UN Permanent Forum on Indigenous Peoples.
- UNDP (2005): *Community Livelihoods and Civil Society Organisations in Papua, Indonesia, A Snapshot y Local Non-Government Organisations*.
- Van der Ploeg, J.D. Renting, H. Brunori, G. Knickle, K. Mannion, J. Marsden, T. Roest, K. Sevilla-Guzman, E. Ventura, F. (2000): Rural Development: from Practices and Policies Towards Theory. *Sociologia Ruralis*, Vol 40, Number 4, October 2000 pp. 391-408
- Wally, Y. (2013): *Percepatan Pembangunan dan Kemandirian Kampung, Memahami "Gagasan Gila" Bantuan 1 Milyar Tiap Tahun Untuk Kampung Gaya YW (Yusuf Wally)*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Widjaja, HAW. (2014): *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Widjojo, M.S., Elisabeth, A., Al-Rahab, A., Pamungkas, C., dan Dewi, R (2009): *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI.
- Woolcock, M., and Narayan, D. (2000): Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. *World Bank Research Observer*, 15(2).
- Yanthy, N. O., Sitorus, Y. L. M., dan Numaningtyas, A. R. (2022). The Resilience of the Indigenous People Towards Natural Disasters: Case of Central Mountains of Papua. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(2), 177-186. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n2.p177-186.2022>
- Yin, R.K. (2013): *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Zaldivar, V.B.S. (2008): From Agrarian Reform to Etnodevelopment in the Highlands of Ecuador. *Journal of Agrarian Change*, 8(4), 583-617.
- Zuchdi, D. dan Afifah, W. (2019): *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

INDEKS

-
- A**
Adiyoso · 70, 123
Adusei-Asante · 70, 123
Amien · 115, 123
Antropologi · 131
Arnstein · 68, 78, 123
-
- B**
Bahua · 9, 123
BAMUSKAM · 103
Booher · 78, 123
Browne · 70, 124
BUMKAM · 103
-
- C**
Cakrawijaya · 70
Caleffi · 115, 124
CDD · 70
Chambers · 66, 124
Clarke · 113, 115, 124
Clearly · 66, 71, 124
Cooke & Kothari · 71
-
- D**
Dasgupta · 70, 124
de Zaldivar · 120
Deaton · 81, 82, 124
Desa · 14, 16, 17, 62, 73, 77,
81, 82, 83, 84, 124, 126,
131, 132
Desa Berkembang · 17
Desa Mandiri · 17
Desa Tertinggal · 17
Distrik · v, vi, vii, x, 8, 9, 13,
16, 18, 20, 21, 22, 32, 33,
35, 37, 40, 46, 47, 48, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 63, 64, 73, 108,
109, 128
Dodson · 115
Duma · 25, 40
-
- E**
Energi · 15, 59, 89, 90
Enumerator · 7, 8
Ethnodevelopment · 130
-
- F**
Furchan · 10, 125
-
- G**
Gustztav · 82
-
- H**
Hancock · 70, 123
Handayani · 119, 125
Henkel & Stirrat · 71
Hettne · 115, 125
Hikmat · 67, 125
-
- I**
Ife & Tesoriero · 71
Infrastruktur Air Bersih · 15,
91
Infrastruktur Ekonomi · 15,
87
Infrastruktur Komunikasi ·
16, 94
Innes · 78, 123
IPD · 1, 14, 16, 17, 108
IPK · 14, 108, 118

IPM · 1, 118

Ison · 121

K

Kampung · ii, iii, iv, v, vii, x, 1, 6, 8, 13, 14, 18, 21, 22, 84, 103, 104, 105, 108, 109, 112, 116, 118, 126, 128, 130

Kedaulatan Rakyat · 69

Keen · 121, 126

Kemitraan · 124, 125

Kepadatan penduduk · 36, 117

Kepadatan Penduduk · v, 37

Kerlinger · 10, 11, 126

Kesehatan · vi, vii, ix, 15, 16, 55, 56, 58, 86, 100, 101, 128

Kesenjangan · 1, 42

Ketertinggalan peradaban · 2

Komunikasi · 16, 60, 129

Konflik · 44, 129

Konsep pembangunan · 3, 4, 114, 115

Korten · 4, 125

Kuncoro · 3, 5, 74, 127

L

Lane · 115, 127

Lowe · 82

M

Macdonald · 115, 127

Mansoben · 38, 127

Melanesia · 38

Murdoch · 82, 127

Musdes · 73, 77

Musrenbang · 73, 75, 77, 121

N

Nagawan · 40

Nelson · 81, 82, 124

Non Partisipasi · 68

Nur · 119, 125

O

Orang Asli Papua · 5

P

PAP · 67

PAR · 67, 71

Partisipasi Pretty · vii, 69

Partisipatif · ii, iii, 6, 66, 123, 124

Paulo Freire · 68

Pelayanan Pendidikan · 15, 84

Pelayanan Umum · 16, 102

Pembangunan desa · 81

Pembangunan Desa · iii, v, 1, 14, 15, 81, 123, 132

Pemberdayaan · 123, 125, 128, 129

Pemberdayaan Masyarakat · 123, 125, 129

Pendekatan partisipatif · 72

Pendidikan · vi, viii, ix, x, 49, 50, 81, 86, 100, 104, 105, 123, 125, 127, 128, 136

Penduduk · iii, iv, v, vi, 1, 2, 10, 13, 35, 37, 41, 50, 113, 114, 116, 123

Penduduk asli · 2, 41, 113, 114

Penduduk Asli Papua · iv, 116

Perdagangan · 63

Perencanaan · ii, iii, iv, viii, 3, 5, 6, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 116, 123, 127, 129, 131, 136, 137

Perencanaan alokasi · 77

Perencanaan partisipatif · 78
Perencanaan pembangunan ·
3, 74, 137
Pertumbuhan Penduduk · v,
35
PLA · 67
PLM · 67
Populasi · 9, 10
PRA · 67, 124
PRD · 67
Pretty · 68, 70, 78, 128
PROSPEK · 2, 137
PTD · 67

R

RESPEK · 1, 128, 137
Riddell · 71, 72, 128
RKPD · 74
RPJM · 73, 74
RRA · 67

S

Sanitasi · 15, 91
Seers · 4

Siscawati · 114, 129
SPM · 17, 109
Suku asli · 38
Susan · 113, 129
Susilo · 70, 129

T

Talalla · 115, 130
Taylor · 77, 130
Tokenism · 68
Transportasi · ix, x, 16, 60, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102

U

Ubi Jalar · v, 46

V

Van Der Plog · 82

W

Wallerstein · 113

Z

Zona ekologi · 38, 136

GLOSARIUM

Aksesibilitas hal dapat dijadikan akses; hal dapat dikaitkan; keterkaitan. Aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan

Antropologi ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau

BAMUSKAM Badan Musyawarah Kampung

Bigman dalam bahasa lokal menagawan, artinya 'orang berwibawa'. Orang berwibawa meraih status sebagai pemimpin bukan karena warisan. Ini adalah pencapaian status, yang diraih atas dasar perilaku, tindakan, dan usaha memenangkan persaingan dengan orang-orang lain atau lawan yang menjadi pesaing.

Pendekatan Bottom-up Pendekatan Bottom-up adalah perencanaan pembangunan dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi.

Budaya Asli nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu

Budaya Patron-Klien aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior).

BUMKAM Badan Usaha Masyarakat Kampung

CDD *Community Driven Development* (Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat)

Desa berkembang desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya

Desa mandiri desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan

Desa tertinggal desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

Desentralisasi sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah; penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya)

Distrik bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu; wilayah: -- MILITER; -- PEMILIHAN; daerah bagian dari kabupaten yang pemerintahannya dipimpin oleh pembantu bupati (sebelum tahun 1970)

Efek Trickle Down kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata

Enumerator petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pencacahan atau pengumpulan data

Ethnodevelopment pendekatan yang menempatkan budaya sebagai pusat dari perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan (pedalaman).

Focus Group Discussion diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator

Infrastruktur air bersih komponen fisik infrastruktur air bersih terdiri dari sumber, transmisi, pengolahan, distribusi, dan konsumen.

Infrastruktur Energi infrastruktur yang mencakup pembangkit, jaringan transmisi, sampai jaringan distribusi.

Sistem transmisi dan distribusi merupakan sistem penghubung antara produsen dan konsumen akhir yang berperan penting dalam ketersediaan energi.

IPD Indeks Pembangunan Desa

IPK Indeks Pembangunan Kampung

IPM Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten pemekaran pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Kedaulatan rakyat memandang dan memaknai kekuasaan itu berasal dari rakyat

Kelompok minoritas Kelompok minoritas merupakan kelompok yang identik dengan kekurangan dan keterbatasan.

Kemitraan suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.

Kesenjangan perihal (yang bersifat, berciri) senjang; ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan; jurang pemisah

Melanesia etnis dari kelompok orang yang memiliki ciri fisik berkulit hitam dan berambut hitam keriting.

Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Ondoafi pemegang garis keturunan yang di tarik melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan adalah anak laki-laki sulung Ondoafi sebelumnya.

Orang Asli Papua orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua dan/atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua.

Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah.

Pendekatan Partisipatif salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Pembangunan berbasis masyarakat konsep pembangunan yang lebih membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga pembangunan dapat mengacu dengan kebutuhan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Pemberdayaan 1. kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; 2 kekuatan; tenaga yg menyebabkan sesuatu bergerak; 3 akal; ikhtiar; upaya.

Pemberdayaan masyarakat : proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

PLA *Participatory Learning and Action*

PLM *Participatory Learning Methods*

Populasi seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu; sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian

PRA *Participatory Rural Appraisal*

PRD *Participatory Research and Development*

PROSPEK Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung

PTD *Participatory Technology Development*

RESPEK Rencana Strategis Pembangunan Kampung

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Metode RRA *Rapid Rural Appraisal* (suatu metode untuk memahami suatu permasalahan melalui wawancara mendalam atau menggunakan kuesioner semistruktural. Sampel dalam pengambilan data kurang diperhatikan, lebih menekankan pada realitas sosial dan ekonomi pada suatu masyarakat desa).

Sanitasi usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; -- lingkungan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara

Sistem kepemimpinan campuran kedudukan pemimpin diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian atau berdasarkan kemampuan individualnya (prestasi dan keturunan) tipe ini terdapat pada penduduk Teluk cenderawasih, Biak, Wandamen, Waropen, Yawa, dan Maya

SPM Standar Pelayanan Minimum

TENTANG PENULIS

Yannice Luma Marnala Sitorus adalah staf pengajar pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pendidikan terakhirnya adalah Doktor di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Bidang kajian yang ditekuni adalah isu-isu perencanaan di wilayah Papua, khususnya yang terkait dengan penduduk asli Papua.

Syamsudin Usman adalah staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pendidikan terakhirnya adalah Magister di Program Studi Kebijakan Publik, Universitas Cenderawasih. Bidang kajian yang ditekuni adalah isu-isu kebijakan publik dan pemerintahan kampung di Papua.

Normalia Ode Yanthy adalah staf pengajar pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pendidikan terakhirnya adalah Magister di Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. Bidang kajian yang ditekuni adalah isu-isu pembangunan wilayah, khususnya pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF PADA PENDUDUK ASLI

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemikiran baru terhadap proses perencanaan pembangunan di daerah yang sedang berkembang dan mayoritas berupa pedesaan, serta didiami oleh masyarakat tradisional atau komunitas adat. Pendekatan partisipatif, dalam perencanaan pembangunan, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas, merupakan cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Lewat konsep tersebut, masyarakat berupaya diberdayakan sehingga mampu secara mandiri merencanakan dan membangun daerahnya masing-masing. Melakukan pembangunan secara mandiri ini penting maknanya bagi suatu komunitas adat atau penduduk asli karena berbagai program pembangunan yang berasal dari luar desa atau kampung terkadang kurang memperhatikan budaya atau kearifan lokal yang berlaku dan pada akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga.



MEGAPRESS

Anggota IKAPI Nomor : 435/JBA/2022

E-Mail : press.megapress@gmail.com

Office : Janati Park III Cluster Copernicus Blok D.07, Cibeusi, Jatinangor

Sumedang - Jawa Barat - Indonesia 45363

Telp : 0812-4208-8836

ISBN 978-623-8040-78-0

